

**ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN PARK GEUN-HYE
TERHADAP KESENJANGAN GENDER DI KOREA SELATAN**

(2013 – 2017)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

KARINA ALKHIRNY

17323037

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN PARK GEUN-HYE
TERHADAP KESENJANGAN GENDER DI KOREA SELATAN
(2013 – 2017)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

KARINA ALKHIRNY

17323037

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN PARK GEUN-HYE TERHADAP KESENJANGAN GENDER DI KOREA SELATAN (2013-2017)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

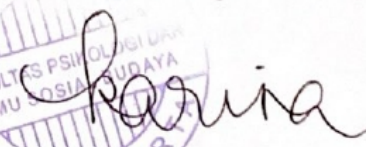
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

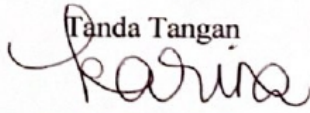
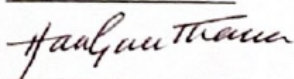
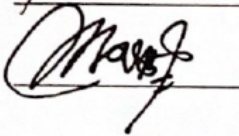
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.)

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
Penulis,



Karina Alakhirny

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KESENJANGAN GENDER DI KOREA SELATAN DAN KONTEKS SOSIAL POLITIK PARK GEUN-HYE	16
2.1. Budaya Patriarki dan Kesenjangan Gender di Korea Selatan.....	16
2.2. Latar Belakang Sosial dan Politik Park Geun-Hye	21
2.2.1 Kebijakan dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye.....	26
BAB III ANALISIS IDENTITAS KOLEKTIF DAN PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM KEPEMIMPINAN PARK GEUN-HYE	34
3.1. Analisis Identitas Kolektif dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye	34
3.1.1 <i>Relationship-specific</i>	36
3.1.2 <i>Issue or threat-specific</i>	38
3.1.3 <i>Egoistic identities</i>	39

3.2. Analisis Perubahan Struktural dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye	40
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Keterbatasan dalam Identitas Kolektif Kepemimpinan Park Geun-Hye</i>	49
---	-----------

DAFTAR SINGKATAN

DPK	: <i>Democratic Party of Korea</i>
GNP	: <i>Grand National Party</i>
KCIA	: <i>Korean Central Intelligence Agency</i>
KOCIS	: <i>Korean Culture and Information Service</i>
MGE	: <i>Ministry of Gender Equality</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>

ABSTRAK

Terpilihnya Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan pertama di Korea Selatan membawa ekspektasi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, terutama terkait isu gender yang telah melekat dalam kehidupan Korea Selatan sejak lama akibat sejarah kelam yang menyangkut para perempuan. Namun, hingga berakhirnya masa kepemimpinan Park Geun-Hye, nyatanya isu mengenai gender masih tidak mendapatkan perubahan yang berarti. Melalui pendekatan Identitas Kolektif dan Perubahan Struktural oleh Alexander Wendt, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dalam masa pemerintahan Park Geun-Hye. Bagaimana ia menggunakan identitas dirinya sebagai perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden perempuan pertama. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa Park Geun-Hye menggunakan identitas gendernya dalam meraih keuntungan pribadi dirinya, dan bukan mewakili identitas kolektif dari perempuan dari Korea Selatan. Sehingga, perubahan struktural kemudian tidak dapat terpenuhi dan Korea Selatan tetap menjadi negara dengan budaya patriarki yang kuat.

Kata-kata kunci: Park Geun-Hye, Kesenjangan Gender, Presiden Perempuan, Identitas Kolektif, Perubahan Struktural, Korea Selatan

ABSTRACT

The election of Park Geun-Hye as the first female president of South Korea brought high expectations among the public, especially regarding gender issues that have long been embedded in South Korean life due to a dark history involving women. However, by the end of Park Geun-Hye's leadership, gender issues had not seen significant change. Using Alexander Wendt's approach to Collective Identity and Structural Change, this study aims to analyze what actually transpired during Park Geun-Hye's administration. It examines how she utilized her identity as a woman in fulfilling her role as the first female president. The findings of this study reveal that Park Geun-Hye used her gender identity for personal gain rather than representing the collective identity of South Korean women. Consequently, structural changes were not realized, and South Korea remained a country with a strong patriarchal culture.

Keywords: Park Geun-Hye, Gender Gap, Female President, Collective Identity, Structural Change, South Korea

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 19 Desember 2012, Korea Selatan menyelenggarakan pemilihan umum presiden untuk keenam kalinya setelah berubah menjadi negara yang berlandaskan sistem demokrasi. Dimulai sejak tahun 1987, cara pemilihan presiden di negara ini telah berganti menjadi secara terbuka dan umum menggunakan voting popularitas (Bedeski 2002). Meskipun kandidat aslinya hingga mencapai tujuh calon presiden, nyatanya hanya dua kandidat utama yang menarik perhatian masyarakat, yaitu: Park Geun-Hye yang mewakili *Saenuri Party* (partai konservatif) dan Moon Jae In yang mewakili *Democratic Party*. Dalam ajang pemilihan ini, Park Geun-Hye unggul pada 51,6% melawan Moon Jae In yang mendapatkan suara sebanyak 48%. Pemilihan saat itu kemudian menjadi pemilihan umum dengan rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir karena memiliki partisipasi pemilih sebanyak 78,6% dari total seluruh penduduk yang terdaftar (Gajdos and Bendini 2012, 3).

Pemilihan umum ini membawa Park Geun-Hye pada kemenangan dan terpilihnya menjadi sosok presiden perempuan pertama dalam sejarah Korea Selatan maupun di kawasan Asia Timur Laut (Shin 2018, 71). Terpilihnya Park Geun-Hye sebagai seorang presiden perempuan jelas memberikan warna baru serta berbagai harapan akan adanya perubahan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para perempuan di Korea Selatan. Meski sebenarnya, suara mayoritas yang didapatkan oleh Park Geun-Hye berasal dari penduduk berumur 50 tahun ke atas, berbanding dengan suara yang diperoleh Moon Jae In, yang sebagian besar berasal

dari golongan muda (Gajdos and Bendini 2012, 3). Meski begitu, harapan akan kepemimpinan Park Geun-Hye yang dapat memberikan perubahan makin diperkuat dengan adanya slogan yang dicanangkan pada saat masa kampanye, yaitu '*well-prepared first female president*' (Shin 2018, 73). Dalam hal ini, Park Geun-Hye memposisikan dirinya sebagai kandidat yang dapat memberikan perubahan dengan pengalaman politik luar biasa dan unik yang dimiliki (Lee 2017, 386).

Kemudian, sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Timur, saat ini Korea Selatan tengah populer atas pencapaian luar biasanya di kancah global. Negara dengan populasi total mencapai 51,7 juta jiwa ini memiliki ekspansi ekonomi yang terbilang signifikan ("South Korea Population 2023 (Live)" 2023). Hal ini dapat dilihat dari populernya berbagai kultur nasional seperti: musik pop (K-Pop), drama (K-Drama), film, animasi, *game*, makanan, hingga para selebritinya (G. Lee 2009, 130). Melalui kekuatan *soft power* yang dimiliki, Korea Selatan berhasil memanfaatkan keunggulan tersebut untuk memperluas pengaruh diplomatiknya ke berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini jelas memberikan dampak positif terhadap citra Korea Selatan di mata internasional, walau kenyataan yang sebenarnya tidak seindah yang terlihat. Sebagai salah satu negara maju khususnya di Benua Asia, isu kesenjangan gender yang ada di negara ini masih menunjukkan pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Sebelumnya, kesenjangan gender merupakan situasi yang mengacu pada adanya perbedaan dan ketidaksetaraan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Perbedaan yang terjadi meliputi pemberdayaan politik, pencapaian dalam pendidikan, maupun akses terhadap kesehatan. Kesenjangan gender ini biasanya

didasari oleh norma-norma sosial serta stereotip gender, yang kemudian mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap salah satu gender, di mana sering kali didapatkan oleh perempuan. Contoh dari kesenjangan gender ini ialah seperti perbedaan upah yang didapatkan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di mana perempuan dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. Lalu, perempuan juga sering kali terkendala untuk dapat menempati posisi atau pun berpartisipasi dalam sektor publik maupun politik (World Economic Forum 2021, 14).

Di Korea Selatan sendiri, isu kesenjangan gender yang paling terlihat ialah mengenai kesenjangan upah (*Gender Pay Gap*) maupun partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja dan lingkup politik. Menurut data yang dikeluarkan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), memperlihatkan bahwa kesenjangan gender ini tidak mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik bahkan pada masa kepemimpinan Park Geun-Hye. *Gender Pay Gap* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah keadaan ketika ukuran upah perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, dengan cara membandingkan upah tahunan median laki-laki dengan median perempuan (Gould, Schieder, and Geier 2016, 5). Menurut data OECD, Korea Selatan menempati peringkat tertinggi untuk permasalahan *gender pay gap* ini. Bahkan dalam 12 tahun terakhir saja, angka persentase tertinggi jatuh pada tahun 2010 yang mencapai hingga 39,61% pada masa kepemimpinan Lee Myung Bak. Namun, angka tersebut berangsur turun di 36,56% pada tahun 2011 dan 36,30% pada tahun 2012. Sedangkan, pada tahun 2013 ketika masa kepemimpinan Park Geun-Hye dimulai, angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 36,60% dan terus berlanjut

di tahun 2014 menjadi 36,56% hingga mencapai angka 37,18% di tahun 2015. Adapun persentase total rata-rata yang dikeluarkan oleh OECD hanya berotasi pada angka 12-14% saja di setiap tahunnya (OECD 2022). Hal ini secara jelas berlawanan dengan ekspektasi masyarakat Korea Selatan terhadap kepemimpinan Park Geun-Hye.

Selanjutnya, masih dalam pemerintahan Park di tahun 2015, perempuan yang berada pada posisi parlemen hanya mencapai 16,30% saja ketika angka rata-rata yang dikeluarkan oleh OECD mencapai hingga 28,10%. Sedangkan, menteri perempuan hanya berada di angka 5,90% saat rata-rata OECD mencapai hingga 28,90%. Hal ini turut memperlihatkan bahwa pada masa kepemimpinan Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan, ia tidak membawa perubahan yang signifikan dalam kesenjangan gender yang terjadi dalam sistem pemerintahan Korea Selatan (OECD 2021).

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan ini akan menganalisis terkait apa yang sebenarnya terjadi pada era kepemimpinan Park Geun-Hye sehingga kondisi kesenjangan gender pada saat itu tidak mengalami adanya kemajuan yang berarti. Ketika sosoknya sebagai presiden perempuan pertama sangat diharapkan untuk membawa adanya perubahan terutama dalam isu gender. Seperti yang telah diketahui, sebuah pola kepemimpinan yang dalam konteks ini merujuk pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perempuan, seharusnya dapat memajukan masyarakat terutama sesama perempuan lainnya, baik dalam aspek ekonomi maupun tatanan sosial. Terlebih kesenjangan gender yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan maupun kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan, karena isu ini pada dasarnya bukan hanya permasalahan yang terkait pada satu individu.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kepemimpinan Park Geun-Hye, terutama sebagai presiden perempuan, tidak mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kesenjangan gender di Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang serta rumusan masalah, penelitian ini disusun untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana gaya dari kepemimpinan Park Geun-Hye selama menjabat sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan.
2. Untuk dapat mengetahui apa saja janji serta berbagai kebijakan Park Geun-Hye, terutama yang berhubungan dengan gender.
3. Untuk dapat menganalisis bagaimana hasil dan pengaruh dari kepemimpinan Park Geun-Hye selama menjabat terhadap kesenjangan gender yang ada di Korea Selatan.
4. Untuk dapat menganalisis apa saja faktor yang menyebabkan Kepemimpinan Park Geun-Hye terkesan gagal dalam memberikan perubahan terkait isu gender.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kepemimpinan Park Geun-Hye terhadap kesenjangan gender yang ada di Korea Selatan. Maka dari itu, penelitian akan berfokus dalam memperlihatkan isu kesenjangan gender di Korea Selatan walaupun sebenarnya isu tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Namun, untuk penulisan penelitian ini, penulis akan memfokuskan jangka waktu hanya pada rentang tahun 2013 hingga 2017 di mana pada tahun tersebut merupakan masa kepemimpinan Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan pertama di Korea Selatan. Hal ini dilakukan karena Korea Selatan merupakan sebuah negara dengan budaya patriarki yang masih sangat mengakar, sehingga dengan adanya kepemimpinan yang dikepalai oleh perempuan memberikan adanya kesempatan dan harapan terkait perubahan dalam kesenjangan gender. Penelitian ini juga akan berfokus pada kebijakan dan program apa saja yang telah diterapkan oleh Park Geun-Hye terkait gender. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebijakan yang diambil dan bagaimana implementasi nyatanya. Lalu, penulisan ini juga akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Park Geun-Hye pada akhirnya tidak berjalan dengan sempurna hingga di akhir masa kepemimpinan dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Meski Korea Selatan diketahui memiliki sejarah kesenjangan gender yang cukup buruk di dunia, namun terpilihnya Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan pertama dianggap sebagai sebuah pencapaian oleh beberapa pihak yang berpendapat bahwa sang presiden dapat memperbaiki isu gender yang ada. Seperti

dalam jurnal *“President Park Geun-Hye of South Korea: A Woman President without Women?”* (Lee and Jalalzai 2017), penulis menyatakan bahwa tahun 1990-an merupakan tahun di mana terdapat banyak kemajuan dalam posisi wanita di berbagai lembaga eksekutif. Penulis menyatakan menurut data yang didapat bahwa banyak wanita yang berhasil menjadi perdana menteri bahkan memiliki jabatan sebagai presiden. Namun, kedudukan para wanita tersebut didapatkan karena sebagian besar berasal dari keluarga dan latar belakang politik. Hal ini sesuai dengan sosok Park Geun-Hye yang merupakan anak dari Park Chung-Hee yang menjabat pada periode 1963-1979. Penulis kemudian turut menuliskan kritik terkait tindakan Park Geun-Hye yang hanya menominasikan beberapa wanita dalam posisi politik tingkat tinggi, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan janji di masa kampanyenya yang menyatakan akan memilih langsung wanita untuk posisi tersebut.

Selanjutnya kritik tersebut turut didukung oleh jurnal yang berjudul *“Introduction: Gender & Politics in Contemporary Korea”* (J. H. J. Han and Chun 2014), di mana penulis menjelaskan bahwa sebenarnya dalam terpilihnya Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan pertama nyatanya tidak membawa pengaruh yang signifikan. Penulis juga menyebutkan bahwa Margaret Thatcher, Megawati Soekarno Putri, serta Park Geun-Hye sebagai sosok yang dipromosikan oleh partai-partai konservatif nyatanya tidak memprioritaskan wanita serta kesetaraan gender dalam usaha membuat suatu kebijakan.

Jurnal lain yang berjudul *“The relative pay of men and women in South Korea”* (Monk–Turner and Turner 2000) turut menyatakan bahwa persepsi yang muncul dalam masyarakat tentang peran yang pantas dan seharusnya dilakukan

oleh wanita menjadikan penghalang bagi wanita dalam mendapatkan peluang kerja. Hal ini turut terjadi akibat pandangan Konfusianisme yang menyatakan bahwa peran wanita dianggap hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga saja. Penulis juga menyatakan bahwa diskriminasi akan semakin kuat jika wanita tersebut telah menikah, hal ini dikarenakan wanita yang telah menikah dan terutama memiliki anak akan lebih sulit dalam menjaga kualitas kerjanya. Hal ini kemudian yang berdampak pada terjadinya perbedaan dalam pemberian upah wanita dan pria yang kemudian menimbulkan *gender pay gap*.

Jurnal terakhir yang juga relevan dengan topik ini ialah jurnal yang berjudul *“Gender Discrimination in the Workplace: Effects on Pregnancy Planning and Childbirth among South Korean Women”* (J.-H. Kim et al. 2019) yang memberikan kesimpulan bahwa kesenjangan yang diterima oleh wanita di Korea Selatan terkait upah dan diskriminasi dalam pekerjaan memengaruhi tingkat kelahiran di negara tersebut. Pemerintah Korea Selatan bahkan memberikan dorongan agar masyarakatnya dapat menikah dan memiliki anak akibat dari rendahnya tingkat kelahiran tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan para wanita di Korea Selatan memiliki ketakutan akan diskriminasi yang lebih tinggi ketika mereka harus mengajukan cuti melahirkan yang bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja sepihak. Lantas hal ini berdampak pada banyaknya wanita yang memilih untuk menunda keinginan untuk menikah ataupun memiliki keturunan.

Dari berbagai sumber jurnal dan artikel yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kesenjangan gender terbukti sangat merugikan perempuan di Korea Selatan. Selain itu peran Park Geun-Hye sebagai presiden wanita pertama sangat diharapkan untuk membawa perubahan namun nyatanya selama memimpin

ia tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya. Lalu, dari semua tulisan tersebut tidak ada yang membahas tentang bagaimana gaya kepemimpinan dan kegagalan dari masa pemerintahan Park Geun-Hye dapat memiliki keterkaitan terhadap kondisi kesenjangan gender yang terjadi di Korea Selatan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis topik yang ada dengan menggunakan konsep *Collective Identity* dan *Structural Change* yang dikemukakan oleh Alexander Wendt dalam bukunya *Social Theory of International Politics* (1999). Wendt memperkenalkan kedua konsep ini sebagai bagian dari teori konstruktivisme untuk memahami bagaimana identitas dan norma sosial dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan aktor, termasuk dalam isu gender dan kepemimpinan. Teori Wendt membantu menjelaskan bahwa meskipun kepemimpinan dipegang oleh seorang perempuan, seperti Park Geun-Hye, kebijakan gender tidak selalu mengalami perubahan yang berarti tanpa adanya perubahan dalam identitas kolektif dan struktur sosial. Oleh karena itu, teori ini dinilai tepat untuk menganalisis bagaimana kebijakan gender selama masa kepemimpinan Park Geun-Hye berkembang, dan mengapa perubahan yang diharapkan mungkin tidak terjadi.

***Collective Identity* atau Identitas Kolektif**, adalah sebuah konsep yang terbentuk melalui interaksi sosial serta hasil dari konstruksi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini mengacu pada bagaimana suatu kelompok memiliki norma, nilai, dan pemahaman bersama yang berbeda dengan kelompok lainnya (Wendt 1999, 337). Dalam konteks hubungan internasional, identitas kolektif tidak hanya mempengaruhi bagaimana suatu negara dalam melihat dirinya sendiri,

melainkan juga bagaimana negara tersebut dapat berinteraksi dengan negara lainnya. Identitas kolektif ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kebijakan dan perilaku, di mana dapat menciptakan norma dan kepentingan yang akan diakui bersama oleh anggota kelompok. Hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana mereka nantinya akan bertindak dalam lingkup internasional. Menurut Wendt, identitas kolektif ini dapat berubah seiring berjalannya waktu, namun perubahan ini akan membutuhkan interaksi sosial yang terus menerus terjadi serta pengakuan dari semua anggota kelompok (Wendt 1999, 337).

Melalui teori konstruktivismenya, Alexander Wendt menekankan bahwa identitas dan kepentingan aktor internasional dibentuk melalui interaksi sosial dan ide-ide bersama. Meskipun Wendt tidak secara langsung menggunakan istilah seperti "*relationship-specific*," "*issue-specific*," dan "*egoistic identities*," tetapi konsep ini didapat sebagai pengembangan dari teori Wendt. Konsep ini dapat digunakan dalam menganalisis bagaimana identitas kolektif dibentuk dan dibatasi oleh karakteristik tertentu (Wendt 1999, 337–38). Secara umum, konsep ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bagaimana identitas kolektif dapat menjadi terbatas ketika terikat pada hubungan atau isu tertentu. Konsep ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor khusus tersebut mempengaruhi prioritas dan tindakan aktor, seperti yang terlihat dalam kepemimpinan Park Geun-Hye di Korea Selatan. Hal ini juga dapat menjelaskan bagaimana batasan dalam identitas kolektif Park memengaruhi kebijakan dan keputusan politiknya, terutama dalam isu kesetaraan gender.

Structural Change atau **Perubahan Struktural** menurut pandangan Wendt adalah perubahan besar dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi yang dapat

mempengaruhi hubungan antar aktor serta perilaku mereka. Struktur sosial internasional, meskipun tampak stabil, sebenarnya dapat berubah seiring dengan dinamika konstruksi sosial. Wendt berpendapat bahwa struktur sosial internasional terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara aktor-aktor yang membangun identitas kolektif mereka dan menciptakan norma-norma bersama. Ketika identitas kolektif berubah, struktur sosial pun bisa ikut berubah, terutama ketika norma-norma dan identitas yang mendasarinya bergeser. Perubahan ini akan berdampak pada pola interaksi dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional. Wendt juga berpendapat bahwa perubahan struktural sering kali terjadi ketika ada pergeseran dalam cara kelompok melihat diri mereka sendiri dan pihak lain, serta bagaimana norma-norma sosial baru diterima atau ditolak (Wendt 1999, 338).

Dalam menganalisis kebijakan dan kepemimpinan, terutama dalam kasus Park Geun-Hye, bisa dilihat bagaimana identitas kolektif dan struktur sosial yang ada dapat membatasi efektivitas kebijakan gender yang ada. Perubahan struktural dinilai dapat membantu untuk menjelaskan mengapa kebijakan tertentu mungkin tidak efektif, meskipun terdapat usaha yang cukup besar dari pemimpin tersebut. Identitas kolektif yang kuat, seperti norma patriarki di Korea Selatan, dapat menghalangi perubahan yang diinginkan dalam struktur sosial. Sehingga, jika identitas kolektif tidak mendukung adanya sebuah perubahan, struktur sosial biasanya akan tetap sama meskipun ada kebijakan yang ditujukan untuk mengubahnya.

1.7 Argumen Sementara

Sesuai dengan rumusan masalah mengenai kepemimpinan Park Geun-Hye, terutama sebagai presiden perempuan, yang tidak mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kesenjangan gender di Korea Selatan, penulis memiliki argumen sementara bahwa tidak adanya perubahan dalam kesetaraan gender pada masa pemerintahannya dikarenakan kepemimpinannya tidak memihak pada kaum perempuan. Sedangkan, sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan, Park diharapkan dapat berpotensi besar dalam memajukan kesetaraan gender yang terbilang rendah, namun kepemimpinan Park Geun-Hye justru terkesan gagal di mata masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui konsep yang diusung oleh Alexander Wendt, bahwa identitas kolektif Korea Selatan yang masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarki menjadi penghalang dalam efektivitas kebijakan gender yang diusung oleh Park Geun-Hye. Park juga tidak bisa menepati janjinya dalam meningkatkan kesetaraan perempuan jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh OECD terkait kesenjangan upah dan adanya perempuan dalam kursi pemerintahan, sehingga belum ada bentuk dari perubahan struktural yang terpenuhi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat menganalisis fenomena yang dijadikan topik dengan menggunakan landasan teori yang kemudian dapat menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana fenomena tersebut berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dirasa lebih cocok, sehingga penelitian ini tidak menggunakan metode statistika ataupun hal-hal yang diukur menggunakan

angka namun berorientasi kepada pengumpulan berbagai macam data yang sesuai dengan topik. Penelitian kualitatif ini berpaku pada sifat deskriptif dan bertujuan untuk mendapatkan analisis dari suatu topik. Data tersebut kemudian akan dianalisis dan dijabarkan dalam berbagai sub topik secara jelas dan menyeluruh.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek yang akan menjadi pokok pembahasan utama yaitu Park Geun-Hye yang merupakan sosok presiden wanita pertama yang dimiliki oleh Korea Selatan dengan masa jabatan yang berlangsung pada tahun 2013-2017. Sedangkan objek dari penelitian ini ialah bagaimana kepemimpinan Park Geun-Hye terkait isu kesenjangan gender yang terjadi di Korea Selatan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama dalam melakukan analisis dan penjabarannya. Melalui metode ini maka penelitian ini akan menggunakan literatur seperti jurnal, dokumen resmi, buku-buku, maupun artikel atau *report* yang ada di internet yang sesuai dengan topik penelitian ini dalam menganalisis kepemimpinan serta melihat kebijakan yang dilakukan oleh Park Geun-Hye. Sumber-sumber tersebut juga akan diteliti dan dipastikan kredibilitasnya agar dapat menghasilkan analisis yang sesuai.

1.8.4 Proses Penelitian

Data-data yang sudah berhasil dikumpulkan tersebut kemudian selanjutnya akan dibaca dan diteliti secara mendetail. Selanjutnya akan diambil poin-poin penting guna dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif. Lalu, akan dibuat menjadi beberapa sub topik yang akan memberikan spesifikasi terhadap hal-hal yang turut

memiliki hubungan dan dapat menjelaskan secara lebih mendetail lagi tentang penelitian ini. Selanjutnya akan disertakan juga analisis yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari beberapa sub bab berbeda. Hal ini berguna untuk memudahkan penulis dalam menjabarkan poin-poin dari penelitian ini secara lebih runtun dan tepat. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi sebagai berikut:

- BAB I

Bab ini akan berisi mengenai pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, cakupan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, hingga sistematika pembahasan.

- BAB II

Bab ini akan menjelaskan tentang pola kepemimpinan Park Geun-Hye yang terdiri dari profil, latar belakang kehidupan, serta kebijakan-kebijakan yang dicanangkan mulai dari kebijakan umum hingga terkait dengan gender. Lalu pada sub bab berikutnya akan menganalisis kepemimpinan Park menggunakan identitas kolektif.

- BAB III

Bab ini akan menjelaskan apa saja skandal yang terjadi pada masa kepemimpinan Park Geun-Hye, lalu menganalisis kepemimpinan Park melalui teori perubahan struktural.

- **Bab IV**

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan atau inti dari analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta dilanjutkan oleh rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

**PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KESENJANGAN
GENDER DI KOREA SELATAN DAN KONTEKS SOSIAL POLITIK**

PARK GEUN-HYE

2.1. Budaya Patriarki dan Kesenjangan Gender di Korea Selatan

Patriarki didefinisikan sebagai struktur sosial di mana seorang laki-laki yang memiliki hierarki lebih tinggi akan mendominasi, mengeksploitasi, bahkan menindas perempuan (Walby 1990). Salah satu yang mendasari adanya budaya patriarki di Korea Selatan ialah paham Konfusianisme yang berasal dari Cina dan masuk dalam budaya Korea. Saat itu Korea masih belum terbagi menjadi dua negara yang berbeda dan masih berada dalam satu dinasti yang sama. Dalam Konfusianisme, laki-laki memiliki status sosial yang lebih tinggi dikarenakan mempunyai kekuatan untuk dapat merawat orang lain, sedangkan perempuan dibatasi perannya hanya sebagai anak perempuan, istri, ibu, atau menantu. Masyarakat tradisional Korea juga memiliki ajaran bahwa perempuan harus mengikuti atau tunduk kepada ayah, suami, serta anak laki-lakinya sepanjang hidup mereka. Sehingga hal ini menciptakan tidak bebasnya perempuan dalam bergerak dan sistem hierarki sosial yang terus menguatkan dominasi laki-laki (H. Kim 2017, 6).

Dalam Dinasti *Joseon*, nilai-nilai Konfusianisme ini mengubah sistem hubungan keluarga dari matrilineal (garis keturunan melalui ibu) menjadi patrilineal (garis keturunan melalui ayah), sehingga peran suami dianggap lebih unggul daripada istri. Hal ini memberikan suami kendali penuh terhadap urusan warisan serta hak untuk menceraikan sang istri. Perceraian ini dapat dilakukan

berdasarkan “Tujuh Dosa” yang dilakukan oleh perempuan, yaitu: tidak mematuhi mertua, tidak bisa menghasilkan pewaris laki-laki, perzinaan, cemburu terhadap perempuan lain dalam rumah tangga, penyakit serius, mencuri, dan terlalu banyak berbicara. Sehingga dapat dilihat bahwa budaya patriarki yang didasari oleh Konfusianisme dalam masa ini, menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Peran dan hak perempuan dibatasi oleh norma yang mengutamakan laki-laki dalam berbagai aspek (H. S. Han 2004, 124).

Selanjutnya, budaya patriarki yang masih dipengaruhi oleh Konfusianisme ini makin diperkuat dengan adanya praktik terhadap perempuan yang dilakukan oleh Jepang saat menjajah negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik. Saat itu, Jepang yang tengah membangun pangkalan militer di berbagai daerah turut membangun rumah bordil atau *comfort stations* yang ditujukan untuk menjadi tempat bagi para *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu* yang akan dikirimkan dari berbagai wilayah jajahan, termasuk Korea (Min 2003, 930). Para perempuan tersebut kemudian dijadikan sebagai budak seks bagi para pasukan Jepang, sehingga pihak Jepang memilih untuk mengirimkan berbagai perempuan tersebut dari negara jajahannya. Hal ini didasari oleh dua alasan resmi yaitu, mencegah terjadinya pemerkosaan di wilayah yang baru diduduki dan mencegah dari penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) (Ward and Lay 2018).

Kemudian dalam ranah kekaisaran Korea saat itu sendiri, terdapat sosok *Kisaeng* atau *Ginyeo*. Pekerjaan ini dilakukan khusus oleh perempuan dengan tujuan utamanya sebagai penghibur profesional bagi para petinggi Kerajaan Korea dan tamu dari negara lain, serupa dengan *Geisha* di Jepang (B. W. Lee 1979, 75). Berbeda dengan *Comfort Women* yang bekerja atas paksaan, *Kisaeng* nyatanya

merupakan sebuah pekerjaan yang dilegalkan oleh pemerintah di bawah era Dinasti *Goryeo* (935-1392) (Hwang 2015, 20). *Kisaeng* juga memberikan peran penting dalam perkembangan budaya tradisional pada era Dinasti *Joseon* (1392-1910) (I. Lee 2010, 72). Perempuan yang dijadikan sebagai *Kisaeng* berasal dari keluarga kelas paling bawah (*Cheonmin*) yang dilatih secara khusus dengan tujuan untuk dapat memberikan hiburan artistik (I. Lee 2010, 76).

Budaya patriarki ini kemudian membentuk adanya ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut, seperti dalam konteks keluarga tradisional Korea Selatan, pria umumnya dihargai sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan diharapkan hanya untuk mengurus rumah tangga saja. Kendati demikian, sejak tahun 1960-an peran perempuan berangsur-angsur mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik, mereka diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam tenaga kerja (Park 2016, 16). Hingga kemudian pada pertengahan tahun 1980, para perempuan yang bekerja di dunia perkantoran biasanya mendapatkan julukan sebagai '*flowers of the office*'. Mereka dianggap sebagai sosok yang berfungsi untuk membangkitkan semangat atau mencerahkan suasana kantor tersebut. Para perempuan juga kerap kali hanya mendapatkan tugas sederhana yang diberikan oleh supervisor laki-laki, hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak dapat menyelesaikan bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga pekerjaan sederhana seperti; membuatkan teh atau kopi, mendekorasi ruangan kerja, hingga bersih-bersih dinilai menjadi tugas yang lebih tepat (Park 2016, 33).

Selanjutnya, terdapat berbagai kesenjangan gender yang dialami oleh perempuan di Korea Selatan, seperti kesenjangan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, kesenjangan dalam tingkat ketenagakerjaan, kesenjangan dalam

upah, dan kesenjangan representasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Pertama, kesenjangan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana meskipun Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak tahun 1970-an, namun hingga tahun 2012, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 55,2% dan menjadi salah satu yang terendah menurut OECD. Sedangkan pada tahun 2011, kesenjangan dalam partisipasi tenaga kerja mencapai 23,4%, yaitu jauh lebih tinggi dari negara maju lainnya dalam data OECD. Kesenjangan ini juga semakin terlihat jika berdasarkan status pernikahan, di mana laki-laki yang sudah menikah memiliki tingkat partisipasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sudah menikah. Fenomena ini kemudian disebut sebagai “*M curve*”, yang memperlihatkan partisipasi kerja perempuan saat memasuki usia 30-an akan menurun karena adanya tanggung jawab yang lebih besar yaitu mengurus anak (J. Kim, Lee, and Shin 2016, 4).

Kedua, kesenjangan dalam tingkat ketenagakerjaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam lulusan SMA, perempuan memiliki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti sarjana maupun master, laki-laki akan mendapatkan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang juga memiliki pendidikan yang sama. Sehingga dapat dikatakan banyak perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan yang memadai, tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi. Para perempuan sering kali hanya terlibat dalam pekerjaan yang sementara dan

kurang menguntungkan dibandingkan pekerjaan yang lebih stabil seperti yang didapatkan oleh laki-laki (J. Kim, Lee, and Shin 2016, 5).

Ketiga, kesenjangan dalam upah yang menunjukkan perbedaan signifikan terkait penghasilan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2010, rata-rata upah perempuan adalah 2 juta won, sementara laki-laki mendapatkan 3,2 juta won, sehingga perempuan hanya menghasilkan sekitar 64% dari apa yang diperoleh laki-laki. Lalu, untuk perempuan dengan pendidikan tinggi, mereka mendapatkan sekitar 66% dari upah pria dengan kualifikasi yang sama sehingga kesenjangan upah tidak begitu terlihat. Namun, dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi, seperti dokter dan pengacara, kesenjangan upah kembali terlihat dan terasa dikarenakan perempuan dalam profesi ini hanya mendapatkan 61,7% dari penghasilan laki-laki. Hal ini kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki masih menjadi isu yang naik dan turun (J. Kim, Lee, and Shin 2016, 6).

Keempat dan terakhir, yaitu kesenjangan representasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan yang mana di Korea Selatan, perwakilan perempuan masih tergolong rendah. Pada tahun 2008, hanya 41 perempuan yang dapat berhasil terpilih dalam Majelis Nasional dari total 299 kursi. Sedangkan, dalam sektor pemerintahan, perempuan memiliki perwakilan yang sedikit lebih baik, dengan 41% posisi di tingkat federal pada tahun 2010. Di sektor swasta, representasi perempuan tergolong sangat rendah yang mana hanya mencapai 1,9% kursi di dewan direksi perusahaan, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 11,8%. Selain itu, hampir 20% perusahaan besar di Korea Selatan tidak memiliki eksekutif perempuan sama sekali (J. Kim, Lee, and Shin 2016, 7).

2.2. Latar Belakang Sosial dan Politik Park Geun-Hye

Park Geun-Hye memiliki sejarah kehidupan yang terbilang cukup unik dan dramatis. Park Geun-Hye lahir di Kota *Daegu*, yang saat itu masih menjadi ibu kota dari Provinsi *Gyeongsang*, pada 2 Februari 1952. Park merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, ia memiliki satu adik perempuan bernama Park Geun Ryeong dan satu adik laki-laki bernama Park Ji Man. Sejatinya Park Geun-Hye bukanlah sosok asing bagi dunia perpolitikan Korea Selatan, hal ini dikarenakan ia merupakan anak dari Park Chung Hee yang pernah menjabat sebagai presiden ketiga Korea Selatan. Park Chung Hee mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 1963 setelah berhasil melakukan kudeta militer pada tahun 1961 (Gemici 2013, 176).

Memiliki latar belakang militer yang kuat, Park Chung Hee kemudian dikenal atas kepemimpinannya yang tidak luput akan kontroversi. Masyarakat Korea Selatan memiliki berbagai pandangan terhadap pola kepemimpinannya, ada yang menganggap bahwa Park Chung Hee kala itu membawa keajaiban bagi perekonomian Korea Selatan setelah sempat mengalami kemiskinan yang parah pasca perang. Meski demikian tidak sedikit pula yang membenci dan menganggap bahwa ia merupakan seorang diktator brutal (Munro 2022). Walau di masa kepemimpinannya ia dapat mengarahkan Korea Selatan menuju modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat dan menjadi salah satu faktor penting yang membuat negara ini berkembang secara pesat, akan tetapi pola kepemimpinan otoriter dan pelanggaran HAM yang dilakukan masih menjadi hal yang tidak bisa lepas dari citranya.

Tidak dipungkiri kepemimpinan Park Chung Hee kala itu membawanya kepada berbagai macam insiden mengerikan. Salah satunya adalah kematian istrinya pada tahun 1974. Park Geun-Hye yang saat itu masih berusia 22 tahun sedang berada di Prancis untuk melakukan program belajar bahasa karena akan melanjutkan studi setelah berhasil meraih gelar sarjananya di *Sogang University*, namun siapa sangka bahwa ia harus segera pulang karena kematian ibunya yang mendadak. Menurut memoar yang pernah dirilis pada tahun 2007, Park menjelaskan bahwa saat itu ia hanya mengetahui insiden penembakan yang menewaskan ibunya melalui koran yang ada di area terminal bandara setelah kedatangannya. Sebelumnya ia hanya mendapatkan panggilan telepon dari kantor Duta Besar Korea Selatan di Prancis terkait adanya kejadian yang menimpa ibunya tanpa penjelasan lebih (Harlan 2013).

Sang ibu tewas akibat tembakan senjata dari simpatisan Korea Utara yang berniat untuk membunuh Park Chung Hee, kejadian ini jelas menjadi titik balik dalam kehidupan Park Geun-Hye setelahnya. Kepulangannya ke Korea Selatan menjadikan dirinya harus terpaksa melepas cita-cita studinya, Park harus segera mengisi kekosongan politik yang ada dan bertugas menggantikan ibunya menjadi *first lady* di umur yang terbilang muda (Jager 2013, 443). Keputusan Park Geun-Hye untuk mengesampingkan kepentingan dirinya demi kepentingan negara menjadi hal yang membuat masyarakat Korea Selatan saat itu tersentuh. Sepeninggal ibunya, Park Geun-Hye aktif membantu sang ayah dalam berbagai agenda politik, ia selalu terlihat mendampingi Park Chung Hee dalam berbagai acara publik maupun resmi. Kebiasaan itu yang pada akhirnya secara tidak langsung turut membentuk karakter dan pandangan politik dari Park Geun-Hye,

akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung cukup lama. Pada tahun 1979, lima tahun setelah tewasnya sang ibu, Park Geun-Hye harus kembali merasakan duka yang mendalam atas insiden yang menimpa ayahnya. Park Chung Hee tewas secara mendadak akibat tembakan yang terjadi pada 26 Oktober 1979 oleh Kim Jae Kyu yang diketahui sebagai kepala intelijen dari KCIA (*Korean Central Intelligence Agency*). Hingga saat ini alasan pembunuhan tersebut masih belum mendapatkan kejelasan, akan tetapi sang penembak menyatakan pada pengadilan bahwa pembunuhan Park Chung Hee harus dilakukan karena ia dinilai sebagai penghalang dalam keinginan Korea Selatan untuk menjadi negara demokrasi (“1979: South Korean President Killed” 1994).

Setelah berbagai insiden yang menjadikan hidup Park Geun-Hye diwarnai duka, ia meninggalkan *Blue House* (Istana Presiden Korea Selatan) dan memilih untuk tidak muncul ke permukaan publik hingga hampir 20 tahun lamanya. Ia juga memilih untuk tidak menikah bahkan hingga masa kepemimpinannya. Pilihan tersebut dinilai muncul karena pengalaman hidupnya yang cukup tragis, sehingga Park Geun-Hye merasa harus lebih fokus kepada karier bidang politiknya dibandingkan untuk menikah dan membina rumah tangga. Pilihan tersebut semakin diperkuat dengan runyamnya hubungan keluarga Park sepeninggal kedua orang tuanya, Park Geun-Hye diketahui memilih untuk memutus hubungan dengan kedua adiknya. Pada tahun 1997 di masa-masa kesendiriannya, Park mempererat tali persahabatannya dengan Choi Soon Sil anak dari sang mentor spiritual yaitu Choi Taemin. Choi Taemin merupakan pemimpin dari salah satu kultus yang bernama *Eternal Life*. Asal muasal kedekatan Park Geun-Hye dengan Choi Taemin bermula ketika kematian ayahnya, yang mana telah diprediksi oleh Choi lewat mimpinya

pada beberapa jam sebelum terjadinya insiden tersebut. Choi menuliskan surat kepada Park Geun-Hye yang berisikan tentang suruhan untuk mengajak sang ayah dalam agenda makan siang bersama, agar Park Chung Hee terhindar dari insiden penembakan yang akan menewaskannya. Kemudian, sejak saat itu, Park Geun-Hye menjalin hubungan spiritual yang kuat dengan Choi Taemin (Choi 2016).

Pada tahun 1998, setelah menghilang dari sorotan publik begitu lamanya, tidak disangka akhirnya Park muncul kembali dalam ranah politik Korea Selatan. Melihat kondisi Korea Selatan pada krisis moneter yang terjadi saat itu, Park kembali berpolitik dengan janji untuk dapat membantu membangkitkan negaranya kembali (Reuters 2017). Park Geun-Hye terpilih menjadi anggota parlemen mewakili salah satu wilayah di Daegu sebagai kandidat dari partai konservatif *Grand National Party* (GNP), yang nantinya akan berganti nama menjadi *Saenuri Party* pada tahun 2011 (Munro 2022). Park bahkan terpilih kembali menjadi anggota parlemen sebanyak empat periode hingga tahun 2012, ia juga sempat terpilih menjadi ketua dari partai tersebut pada tahun 2004 hingga 2006.

Pada masa jabatannya sebagai ketua partai, Park mendapatkan julukan sebagai “*Queen of Elections*”, julukan tersebut didapatkan atas keberhasilannya membawa GNP menang hingga lebih dari 20% poin dalam pemilihan kepala daerah meskipun ia bukanlah kandidat dalam pemilihan tersebut. Hal ini muncul dikarenakan insiden yang terjadi di *Daejeon* pada 20 Mei 2006. Park saat itu dilarikan ke rumah sakit setelah mendapatkan sayatan di wajahnya yang dilakukan oleh pria berusia 50 tahun yang merupakan seorang kriminal dengan memiliki 8 kasus pidana. Dampak yang didapatkan dari sayatan tersebut terbilang cukup serius sehingga Park harus menjalani operasi serta mendapatkan sekitar 60 jahitan.

Namun, setelah siuan dari operasi yang diperlukan, kalimat pertama yang diucapkan oleh Park Geun-Hye hanya terkait keadaan orang-orang yang hadir dalam kampanye tersebut, hal ini kemudian berperan sebagai salah satu faktor yang turut mendongkrak citra positif dirinya di mata sebagian besar masyarakat (Jong Seok 2006).

Selanjutnya meski telah memiliki rekam jejak karier yang cemerlang dan citra yang baik, pada pemilihan umum presiden tahun 2007, Park Geun-Hye tidak berhasil masuk sebagai kandidat calon presiden. Sang partai lebih memilih untuk menunjuk Lee Myung Bak sebagai kandidat dari *Saenuri Party* yang kemudian berhasil terpilih menjadi presiden kesepuluh Korea Selatan (Munro 2022). Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan antara keduanya menjadi kurang baik. Namun, setelah kegagalan pencalonan dirinya sebagai kandidat calon presiden pada periode sebelumnya, akhirnya Park Geun-Hye berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2012 yang akan melawan Moon Jae In. Moon merupakan kandidat dari *Democratic Party of Korea* (DPK) yang merupakan rival dari *Saenuri Party*. Sebelumnya diketahui ia pernah ditangkap karena melakukan protes terhadap pemerintahan otoriter dari Park Chung Hee, ayah dari sang rival pada tahun 1972 ketika ia masih menjadi mahasiswa hukum (“Moon Jae-in: South Korea’s President with Humble Roots” 2018).

Dalam masa kampanyenya, Park Geun-Hye kembali mengangkat slogan “*Let’s live well*” yang sebelumnya dicanangkan oleh Park Chung Hee. Slogan tersebut dimaknai dengan harapan Park untuk dapat mengembalikan kejayaan pertumbuhan ekonomi dari Korea Selatan seperti pada masa kepemimpinan sang

ayah. Walau sebelumnya, sempat terjadi kontroversi pada suatu agenda atas perkataan Park terhadap orang-orang yang menyinggung keburukan kepemimpinan ayahnya. Sehubungan dengan kejadian tersebut, pada 24 September 2012 akhirnya Park Geun-Hye melakukan konferensi pers guna meminta maaf atas perkataannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kepemimpinan ayahnya di masa lalu (Yeon Cheol 2012).

Selanjutnya, sebagai calon presiden perempuan pertama di Korea Selatan, ia dianggap memiliki potensi yang terbilang lebih besar dalam menciptakan perubahan dan kemajuan dalam isu kesetaraan gender, terutama mengingat bagaimana kondisi patriarki di Korea Selatan masih menjadi hal yang kuat. Bahkan dalam kampanyenya yang berslogan *'well-prepared first female president'*, menunjukkan bahwa dia ingin membangun Korea yang lebih sejahtera di bawah kepemimpinannya sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan. Isu-isu yang kurang mendapatkan perhatian pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti hak-hak perempuan, kesejahteraan keluarga, kesenjangan upah, perlindungan dari kekerasan, serta dukungan dan kesetaraan perempuan di tempat kerja, diantisipasi akan kembali menjadi prioritas utama saat Park Geun-Hye menjabat sebagai pemimpin tertinggi (Cha and Kim 2012).

2.2.1 Kebijakan dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye

Kemudian dalam masa kepemimpinannya, Park Geun-Hye memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan harapan dapat memajukan negara melalui berbagai sektor. *Korean Culture and Information Service (KOCIS)*

menyediakan edaran yang dapat diakses oleh publik mengenai enam kata kunci dari kebijakan utama yang akan diterapkan selama masa kepemimpinan Presiden Park.

Kebijakan yang pertama ialah *Three-Year Economic Innovation Plan*. Setelah krisis ekonomi global 2008, Korea Selatan masih merasakan dampaknya, seperti pengangguran tinggi dan pertumbuhan rendah. Untuk mengatasi ini, Presiden Park meluncurkan agenda nasional dengan tiga tujuan utama: 1) memperkuat dasar-dasar ekonomi, 2) mendorong inovasi, dan 3) menyeimbangkan permintaan domestik dan ekspor (KOCIS 2014, 3–8).

Kebijakan yang kedua ialah *Creative Economy*. Park Geun-Hye percaya bahwa ekonomi kreatif dapat mengatasi masalah ekonomi global seperti pertumbuhan yang lambat, pengangguran tinggi, dan ketidakseimbangan pendapatan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan pertumbuhan terbatas di Korea Selatan, pemerintah Park memfokuskan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan melalui inovasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas (KOCIS 2014, 10–15).

Kebijakan yang ketiga ialah *Regulatory Reform*. Pemerintahan Park percaya bahwa reformasi regulasi penting untuk mendorong investasi dan menyeimbangkan permintaan domestik dengan ekspor. Tanpa reformasi, investasi terhambat dan ekonomi kreatif tidak berkembang. Regulasi yang usang akan menghalangi inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, regulasi harus diperbarui untuk mendukung perkembangan teknologi baru dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu masyarakat menghadapi tantangan dengan lebih baik (KOCIS 2014, 18).

Kebijakan yang keempat ialah *Global Cooperation for Co-properity*. Kebijakan ini menekankan akan pentingnya kerja sama internasional untuk

mencapai kemakmuran bersama. Salah satu agendanya ialah *Eurasian Initiative* yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan integritas antara negara-negara di kawasan Eropa-Asia melalui berbagai proyek ekonomi, infrastruktur, dan budaya. Kebijakan ini juga mendorong adanya kerja sama terkait keamanan global seperti terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan siber, kemiskinan, kesehatan maupun perubahan iklim (KOCIS 2014, 25–28).

Kebijakan yang kelima ialah *Unification Bonanza*. Park mengusulkan kebijakan ini dengan harapan bahwa penyatuan Korea tidak hanya mengatasi masalah politik dan keamanan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi. Penyatuan Korea diperkirakan akan membuka pasar baru, menciptakan peluang bisnis, memanfaatkan sumber daya alam Korea Utara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan stabilitas dan keamanan di semenanjung Korea. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup di Korea Utara dan mempercepat pengembangan teknologi serta daya saing global (KOCIS 2014, 30–35).

Kebijakan yang keenam ialah *K-pop and Cultural Enrichment*. Kebijakan ini fokus pada pembentukan dasar hukum dan institusi untuk kebudayaan, termasuk peluncuran undang-undang yang mendukung K-pop dan produk budaya lainnya. Park juga membentuk Komite Presidensial untuk Pengayaan Budaya, yang bertugas memajukan kebudayaan kemanusiaan dan spiritual serta memperkuat kebudayaan daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan seniman (KOCIS 2014, 37–39).

Selanjutnya kebijakan terkait gender, pada masa kampanyenya, Park Geun-Hye sempat berjanji akan mempromosikan bakat perempuan, meningkatkan berbagai aktivitas ekonomi bagi para perempuan, memperluas layanan penitipan anak, serta melarang adanya berbagai bentuk kekerasan seksual. Terdapat juga

berbagai janji lainnya seperti, pemotongan jam kerja untuk karyawan yang sedang hamil, hak untuk mendapatkan *parental leave* (cuti melahirkan bagi ibu dan cuti menemani sang istri untuk ayah). Park juga mendukung adanya pemberian bantuan terbatas bagi perempuan yang akan melahirkan serta meningkatkan jumlah manajer perempuan dan anggota komisi dalam organisasi pemerintah (Sohn 2012).

Meskipun karier politiknya sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan telah resmi dimulai, Park tidak segera memusatkan perhatiannya pada isu-isu gender. Dalam pidato inaugurasi yang berlangsung pada 25 Februari 2013, Park mengungkapkan rencana utamanya yang berfokus pada peningkatan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pengayaan budaya. Park juga menyampaikan harapan agar Korea Utara dapat melakukan denuklirisasi dan memilih jalur perdamaian serta kemajuan bersama Korea Selatan (News 1 Korea 2013). Namun, hingga acara inaugurasi yang dihadiri oleh lebih dari 70.0000 peserta tersebut berakhir, Park sama sekali tidak menyinggung topik kebijakan yang pro-perempuan (Korea Herald 2013).

Kendati Presiden Park tampak kurang memprioritaskan isu-isu terkait perempuan, ia tidak sepenuhnya mengabaikan permasalahan tersebut. Penelitian tentang agenda pemerintah yang dijalankan pada masa jabatan Park Geun-Hye menyatakan bahwa, Park masih memiliki kebijakan yang ditujukan untuk para perempuan. Meski beberapa kebijakan tersebut terkesan hanya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Park Geun-Hye lebih berfokus pada peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan, terutama mereka yang kariernya terganggu karena pernikahan dan melahirkan. Demi mendukung keseimbangan antar kerja dan keluarga, pemerintah meningkatkan layanan

penitipan dan pengasuhan anak, serta memberikan dukungan kepada berbagai jenis keluarga, seperti orang tua tunggal maupun rumah tangga multikultural. Secara keseluruhan, kebijakan inti yang dilakukan masih berfokus pada peningkatan status ekonomi, politik, dan sosial perempuan, serta upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Y. I. Lee and Jalalzai 2017, 606).

Beberapa kebijakan berbasis gender Presiden Park yang akan dibahas secara lebih mendalam ialah: program layanan penitipan anak, program cuti melahirkan dan *parental leave*, program mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, serta meningkatkan jumlah perempuan dalam sektor politik dan publik.

Dalam program layanan penitipan anak, pada masa sebelum pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun, dukungan pemerintah terhadap fasilitas penitipan anak di tempat kerja antara tahun 1996 hingga 1999 bisa dikatakan nyaris tidak ada. Roh kemudian mewajibkan pemasangan atau memberikan subsidi untuk fasilitas penitipan anak di tempat kerja, terutama yang memiliki 300 pekerja perempuan maupun 500 pekerja total. Roh menggunakan sebagian besar anggaran yang didapatkan dari kebijakan pengembangan perempuan untuk mendanai fasilitas penitipan anak maupun subsidi cuti melahirkan. Hal tersebut dilakukan oleh presiden Roh agar layanan dan fasilitas penitipan anak tidak ditanggung oleh masyarakat langsung dan dapat dibiayai oleh pemerintah, meski sebenarnya jumlah fasilitas penitipan anak publik milik nasional tidak mengalami peningkatan yang berarti (Y. I. Lee and Jalalzai 2017, 608).

Pemerintahan Park Geun-Hye meningkatkan anggaran untuk program penitipan anak dan memperbanyak subsidi untuk keluarga dengan anak-anak di bawah lima tahun, tanpa memedulikan jumlah atau pendapatan keluarga. Park

berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan penitipan anak, serta menyediakan berbagai jenis dan jam operasional layanan. Namun, kritik menyebut bahwa subsidi ini mungkin menurunkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, karena biaya penitipan anak sering kali lebih rendah daripada penghasilan perempuan, terutama di keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, perubahan anggaran dan tekanan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa subsidi ini mungkin tidak sepenuhnya mendukung kesetaraan gender meski terkait dengan kepentingan perempuan (Y. I. Lee and Jalalzai 2017, 608).

Pemerintahan Park Geun-Hye memperluas program parental leave, yang mencakup cuti melahirkan (*maternity leave*) dan cuti untuk ayah (*paternity leave*), dengan menambah anggaran dan melonggarkan kualifikasi. Park berfokus pada peningkatan *paternity leave* berbayar dan mengurangi hambatan bagi karier perempuan, termasuk dengan menyediakan layanan penempatan kerja dan pelatihan untuk membantu perempuan kembali bekerja setelah cuti. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses perempuan di dunia kerja melalui dukungan yang lebih inklusif (Y. I. Lee and Jalalzai 2017, 610).

Masalah yang dihadapi oleh program ini ialah tingkat partisipasi kerja perempuan Korea Selatan yang tergolong rendah, diperkuat dengan kesenjangan upah gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata yang dikeluarkan oleh OECD. Menurut studi perbandingan yang dilakukan OECD terhadap beberapa negara, peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta akan meningkatkan angka kelahiran, sedangkan hal-hal tersebut merupakan fokus utama dari pemerintah Korea Selatan (OECD 2023, 72).

Kemudian dalam program untuk meningkatkan rasio perempuan yang berada dalam sektor perekonomian, pemerintah memutuskan untuk melakukan peningkatan dalam jumlah perempuan yang bekerja melalui pengadaan jam kerja dengan jadwal yang lebih fleksibel serta memberikan lebih banyak pekerjaan paruh waktu. Pemerintah berupaya untuk menyediakan 16.500 pekerjaan paruh waktu, menambah pusat layanan pekerjaan untuk perempuan yang sebelumnya pada tahun 2013 berjumlah 130 layanan menjadi total sekitar 200 layanan pada tahun 2017, serta memberikan pemotongan pajak dan pendanaan yang diberikan kepada perusahaan yang menyediakan pekerjaan dengan jadwal yang fleksibel sebagai pengganti biaya tenaga kerja dan asuransi sosial (Soo Hyun 2015, 260).

Selanjutnya pada program terakhir, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang akan menduduki berbagai sektor publik, Menteri Keluarga dan Kesetaraan Gender mengumumkan akan menambahkan rasio perempuan dalam komite pemerintah pada tahun 2017 sebanyak 40% yang sebelumnya hanya berada pada 25,5% di tahun 2013. Pemerintah selanjutnya juga berencana untuk meningkatkan rasio jumlah direktur perempuan hingga mencapai 15% di tahun 2017 setelah sebelumnya hanya menduduki angka 8,4% pada tahun 2012 (Soo Hyun 2015, 261–62).

Namun, sepertinya kedua program tersebut tidak mendapatkan respons yang cukup baik. Masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang berani untuk benar-benar melakukan perubahan di sektor pelayanan publik. Selain itu Park Geun-Hye juga tidak melakukan peningkatan secara agresif terkait jumlah perempuan yang dipekerjakan di berbagai cabang pemerintahan yang ia pimpin. Bahkan ia tidak berupaya untuk mengangkat perempuan ke dalam posisi-posisi penting di

pemerintahan. Dari sekitar 211 posisi penting dalam pemerintahannya, nyatanya lima perempuan atau hanya 2,3% (Y. I. Lee and Jalalzai 2017). Kenyataannya di dalam kabinet pertamanya, Park hanya menunjuk dua perempuan untuk menjadi Menteri Keluarga dan Kesetaraan Gender serta Menteri Kelautan dan Perikanan yang bahkan dianggap tidak memiliki posisi penting dalam kabinet.

BAB III

ANALISIS IDENTITAS KOLEKTIF DAN PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM KEPEMIMPINAN PARK GEUN-HYE

3.1. Analisis Identitas Kolektif dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye

Menurut Alexander Wendt, dalam konstruktivisme, identitas dan kepentingan terbentuk dari interaksi sosial dan ide-ide bersama. Identitas kolektif benar-benar masuk ke dalam diri individu saat mereka merasa identitas itu sudah jadi bagian penting dari siapa mereka. Sehingga, jika individu merasa dirinya bagian dari suatu kelompok, mereka cenderung peduli dan berusaha menjaga serta memperkuat nilai-nilai kelompok itu. Dalam artian, tindakan mereka tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi juga demi kepentingan bersama kelompok tersebut. (Wendt 1999, 337).

Kepentingan kolektif ini berarti bahwa individu tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Kepentingan tersebut akan mendorong individu untuk bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dalam menghadapi tantangan atau masalah yang mungkin muncul. Jika budaya atau identitas kelompok mereka terancam, maka mereka memiliki naluri untuk langsung membela dan melindunginya. Meskipun tindakan yang mereka lakukan tetap rasional, akan tetapi perhitungan dan keputusan yang mereka ambil akan berlandaskan pada kepentingan kelompok, tidak lagi hanya untuk keuntungan individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas kolektif memainkan peran penting dalam memotivasi individu dalam melakukan kontribusi akan keberlanjutan dan kesejahteraan kelompok, bahkan ketika menghadapi ancaman atau situasi yang sulit (Wendt 1999, 337).

Jika dikaitkan melalui pandangan yang dijelaskan oleh Wendt, keinginan Park Geun-Hye dalam membangun identitas kolektif dapat dilihat dari upayanya untuk menyerukan kembali slogan *“let’s live well”* dan mencanangkan slogan *“well-prepared first female president”*, untuk menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam masyarakat Korea. Park berusaha untuk membentuk identitas kolektif dengan mengusung kembali *“let’s live well”* sebuah slogan yang sang ayah canangkan saat masih memimpin. Park ingin menginspirasi rakyat Korea Selatan untuk mengaitkan kesejahteraan nasional dengan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan dorongan agar masyarakat dapat bersatu demi kesejahteraan bersama, sama seperti apa yang telah dicapai pada masa kepemimpinan ayahnya kala itu.

Selanjutnya, dengan menekankan identitasnya sebagai presiden perempuan pertama melalui slogan *“well-prepared first female president”*, Park berusaha untuk memperluas cakupan identitas kolektif melalui kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai-nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat. Identitas kolektif ini tidak hanya mengedepankan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih menyeluruh, dengan menempatkan peran perempuan dalam kepemimpinan sebagai elemen penting dari identitas nasional. Park ingin menunjukkan bahwa ia khususnya sebagai perempuan sudah sangat siap akan segala tantangan yang akan dia hadapi saat menjadi pemimpin negara. Terlebih sebagai presiden perempuan pertama, Park Geun-Hye dirasa akan menjadi ikon transformasi dalam cara masyarakat Korea Selatan memandang peran gender dalam kepemimpinan.

Kemudian untuk analisis yang lebih mendalam, akan dilakukan analisis melalui konsep pengembangan yang merupakan interpretasi lebih lanjut dari teori konstruktivisme Alexander Wendt yaitu, *relationship-specific*, *issue-specific*, dan *egoistic identities*. Meskipun Wendt tidak secara eksplisit menyebutkan konsep-konsep ini, prinsip-prinsip dasar dalam karyanya, seperti pentingnya interaksi sosial dan ide-ide bersama dalam membentuk identitas, menjadi dasar bagi pengembangan ini. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk menganalisis bagaimana hubungan spesifik, fokus pada isu tertentu, dan kepentingan egoistik memengaruhi pembentukan dan batasan identitas kolektif. Penggunaan konsep-konsep ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas kolektif dapat dipengaruhi dan dibatasi oleh faktor-faktor spesifik, yang kemudian berdampak pada prioritas dan tindakan aktor dalam konteks politik atau sosial yang lebih luas, seperti yang terlihat dalam kepemimpinan Park Geun-Hye di Korea Selatan.

3.1.1 *Relationship-specific*

Konsep yang pertama ialah *relationship-specific* atau yang dijelaskan sebagai hubungan identitas kolektif yang bersifat spesifik. Konsep tersebut hanya muncul dan berlaku secara eksklusif pada hubungan-hubungan tertentu yang memiliki sifat atau kondisi yang spesifik dan tidak dapat ditemukan pada hubungan lainnya. Salah satu contoh yang diberikan Wendt berupa secara identitas Perancis memiliki gaya keamanan yang mirip dengan Jerman, namun belum tentu sikap Jerman terhadap Brazil misalnya, akan sama dengan sikap Jerman kepada Perancis karena adanya hubungan antar negara yang berbeda (Wendt 1999, 337).

Maka analisis dari konsep ini terkait konteks identitas kolektif Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan menunjukkan bahwa sesungguhnya identitas yang dibangun tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan semua kelompok yang ia wakili, terutama perempuan. Meski Park sendiri merupakan seorang perempuan sekaligus pemimpin negara, ia tidak secara aktif memajukan agenda kesetaraan gender atau memperjuangkan peningkatan peran perempuan di Korea Selatan. Identitas Park sebagai presiden perempuan didasarkan oleh latar belakangnya sebagai anak dari mantan presiden ketiga Korea Selatan, yang kemudian memberikan dia *privilege* dan pengalaman politik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan perempuan lainnya. Hal tersebut dikarenakan Park tidak merasakan diskriminasi gender secara langsung, sehingga identitas kolektifnya sebagai perempuan dalam politik tidak sepenuhnya terhubung dengan perjuangan perempuan lain di Korea Selatan yang menghadapi isu kesetaraan gender yang nyata.

Dalam konteks *relationship specific*, identitas kolektif yang diusung oleh Park kemungkinan hanya terfokus pada pencapaian tujuan nasional yang lebih luas dan umum, seperti kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik, daripada memperjuangkan hak-hak perempuan. Identitas kolektifnya sebagai pemimpin nasional lebih mendominasi dibandingkan dengan identitas gendernya. Hal ini menunjukkan bagaimana Park sebagai presiden perempuan malah menciptakan hubungan identitas yang bersifat spesifik pada tujuan politik dibandingkan mencakup kepentingan perempuan Korea. Hal tersebut turut menjelaskan mengapa ia tidak secara aktif menekankan akan memperjuangkan pada kesetaraan gender serta peningkatan peran perempuan di Korea Selatan karena identitasnya lebih

berfokus kepada peran pemimpin nasional dengan latar belakang istimewa yang dimiliki.

3.1.2 *Issue or threat-specific*

Konsep yang kedua ialah *issue or threat-specific* di mana Wendt menjelaskan bahwa identitas kolektif memiliki batasan dan pengaruh yang bergantung pada tujuan dari pembentukannya, dan dalam konteks ini berarti terkait dengan isu atau ancaman tertentu. Terdapat dua budaya yang dimasukkan oleh Wendt sebagai penentu, yaitu budaya Lockean dan budaya Kantian. Dalam budaya Lockean, negara-negara mungkin bersatu hanya ketika akan menghadapi ancaman eksistensial seperti ancaman kematian, sedangkan untuk isu keamanan yang tergolong lebih umum tidak terlalu diperhatikan dengan anggapan masih ada harapan untuk saling mengandalkan diri sendiri (*self-help*). Sedangkan dalam budaya Kantian, identitas kolektif memiliki cakupan yang lebih luas. Negara-negara cenderung bekerja sama dalam menghadapi berbagai jenis ancaman militer, tidak hanya pada ancaman yang bersifat eksistensial. Identifikasi dan kerja sama ini tidak terbatas hanya pada ancaman kematian, melainkan pada segala bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan bersama secara umum (Wendt 1999, 337).

Saat dilantik sebagai presiden, Park Geun-Hye tidak menekankan pada isu kesetaraan gender maupun kebijakan yang mendukung perihal peningkatan perempuan di Korea. Sebaliknya, Park lebih berfokus pada tujuannya untuk melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya tanpa menyoroti ancaman terkait isu gender. Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam pidato inaugurasi yang

dilakukan, Park hanya menyoroti terkait kemajuan Korea Selatan secara umum serta keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Dalam kebijakan yang dibuat, Park juga lebih mengutamakan berbagai kebijakan terkait ekonomi dan sosial, seperti yang ada dalam 6 kebijakan utama yang dikeluarkan oleh *KOCIS*.

Dapat dikatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Park lebih identik dengan budaya Lockean yang mana meskipun Park adalah seorang perempuan, ia tidak memprioritaskan isu-isu gender serta memandang bahwa permasalahan gender bukanlah suatu ancaman bagi kesejahteraan atau stabilitas nasional Korea. Dalam kata lain, Park tidak melihat kesetaraan gender sebagai elemen utama dalam identitas kolektif dari Korea Selatan yang perlu untuk diprioritaskan. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk melanjutkan kebijakan yang telah ada tanpa merasa perlu menyoroti ancaman potensial yang mungkin muncul jika isu-isu gender diabaikan.

3.1.3 *Egoistic identities*

Konsep yang ketiga dan terakhir ialah *egoistic identities*. Wendt menjelaskan bahwa identitas kolektif sering kali berbenturan dengan kepentingan pribadi. Individu cenderung mengutamakan kebutuhan dasar mereka sendiri, sehingga mereka tidak selalu siap untuk sepenuhnya mengorbankan diri demi kelompok. Keterikatan dengan kelompok sering kali memiliki sisi yang ambigu, dikarenakan inginnya untuk tetap memiliki keunikan sebagai individu namun ingin juga menjadi bagian dari suatu kelompok. Dapat dikatakan bahwa meski identitas kolektif telah terbentuk, identitas egoistik atau kepentingan pribadi masih

memainkan peran (Wendt 1999, 337). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa identitas egoistik ini kemudian ditemukan pada diri Park Geun-Hye.

Saat mencalonkan diri terutama pada masa kampanye, Park menggunakan identitasnya sebagai perempuan guna menarik perhatian pemilih, terutama sesama perempuan, dengan harapan bahwa identitas tersebut akan memperkuat suara yang diperoleh. Hal ini kemudian menyebabkan akan adanya harapan yang dimiliki oleh para perempuan terkait majunya Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan. Namun, yang terjadi saat inaugurasi, Park justru tidak menekankan identitas dirinya sebagai perempuan guna memajukan kesetaraan gender. Tidak ada janji ataupun komitmen khusus yang ia berikan ini, hal ini mencerminkan keputusannya untuk menggunakan identitasnya sebagai perempuan demi kepentingan pribadi, hanya sebagai alat dan kepentingan kampanye semata. Ketika bisa saja Park menggunakan identitas tersebut untuk membentuk identitas kolektif yang mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, identitas gender Park Geun-Hye lebih berperan sebagai alat politik praktis dibandingkan upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan di Korea.

3.2. Analisis Perubahan Struktural dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye

Alexander Wendt dalam tulisannya menjelaskan bahwa perubahan dalam norma sosial dan interaksi sosial dapat mempengaruhi identitas kolektif sebuah kelompok. Ketika struktur budaya atau norma mengalami perubahan melalui interaksi, identitas kolektif kelompok tersebut juga akan ikut berubah, sering kali diikuti dengan hilangnya identitas lama dan munculnya identitas baru. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan identitas dan perubahan struktur adalah dua

hal yang berbeda. Identitas terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi di tingkat mikro, seperti di antara individu atau kelompok kecil, sedangkan perubahan struktur terjadi pada tingkat yang lebih luas, seperti dalam masyarakat atau negara. Meskipun keduanya berbeda, perubahan struktur sering kali bergantung pada perubahan identitas di tingkat mikro terlebih dahulu, yang kemudian dapat mendorong perubahan di tingkat makro (Wendt 1999, 338).

Proses perubahan struktur bukanlah hal yang mudah. Istilah 'struktur' sendiri merujuk pada pola atau hubungan yang stabil dan bertahan lama. Jika segalanya terus berubah, maka konsep struktur kehilangan relevansinya. Karena itu, struktur cenderung stabil dan membutuhkan upaya besar untuk diubah (Wendt 1999, 339). Selain itu, perubahan struktur juga dipengaruhi oleh sejarah sebelumnya, atau yang dikenal sebagai *path dependency*. Dalam politik internasional, identitas kolektif sebuah negara atau kelompok tidak muncul dari nol, tetapi dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang sudah ada. Budaya ini sering kali mendorong respons egoistik terhadap perubahan lingkungan, seperti permusuhan atau persaingan. Untuk bergerak dari kondisi yang fokus pada kepentingan pribadi menuju kondisi ideal dengan keamanan bersama, diperlukan perubahan sikap dari yang egoistik menjadi lebih kolektif.

Namun, perubahan ini tidak selalu pasti terjadi. Egoisme sudah sangat tertanam dalam hubungan internasional, sehingga gagasan bahwa negara-negara bisa menjadi "teman" sering dianggap tidak realistis. Meskipun terdapat tekanan untuk menjalin hubungan yang lebih baik, komitmen terhadap identitas egois mungkin sulit dihilangkan. Perubahan identitas merupakan proses yang dinamis

antara diri yang ada saat ini dan diri yang diinginkan di masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa kita bisa melepaskan diri dari masa lalu (Wendt 1999, 340).

Dapat dikatakan bahwa salah satu alasan utama atas kegagalan Park Geun-Hye dalam membangun identitas kolektif yang kuat dikarenakan ia tidak berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong terkait kesetaraan gender meskipun ia adalah presiden perempuan pertama. Padahal, sebagai presiden perempuan pertama, Park diharapkan untuk menjadi simbol perubahan terlebih mengenai patriarki yang masa kuat di Korea Selatan. Namun dalam masa kepemimpinannya, Park gagal dalam memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang mendukung tentang kesetaraan gender. Meski Park menunjuk dua menteri perempuan, hal ini belum cukup untuk memicu perubahan struktural yang berarti. Tantangan ini diperburuk oleh budaya Korea Selatan yang masih sangat didominasi oleh nilai-nilai maskulin serta adanya resistensi yang kuat terhadap perubahan di tingkat birokrasi.

Menurut Wendt, meskipun ada sebuah usaha untuk membentuk identitas kolektif baru, contohnya dengan mengakui peran perempuan dalam masyarakat, upaya tersebut gagal karena tidak didukung oleh perubahan struktural yang berarti (Wendt 1999, 339). Identitas lama yang masih didominasi oleh patriarki dan dominasi laki-laki masih bertahan, sehingga menghambat terciptanya "*we-feeling*" yang inklusif dan setara.

Selain gagal memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada gender, masa kepemimpinan Park Geun-Hye juga diguncang oleh serangkaian skandal yang menggoyahkan fondasi pemerintahannya. Skandal yang paling mencolok adalah kasus korupsi yang melibatkan Park dan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil.

Skandal ini tidak hanya menghancurkan citra pribadi Park tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan. Park menggunakan kekuasaannya untuk memberikan akses secara ilegal kepada Choi Soon Sil terhadap dokumen pemerintahan. Sehingga Choi Soon Sil dapat mengendalikan berbagai kebijakan penting maupun keputusan presiden yang kemudian akan menguntungkan kepentingan pribadinya (E. G. Kim 2016).

Selanjutnya, menurut Wendt, perubahan struktural sulit terwujud karena terhambat oleh jalur sejarah yang sudah terbentuk sebelumnya (*path dependency*) dan budaya yang telah lama mengakar. Dalam konteks ini, budaya politik Korea Selatan yang sarat dengan egoisme dan persaingan semakin memperburuk situasi. Respons Park terhadap tekanan lingkungan, terutama terkait skandal yang ia miliki, mencerminkan sikap egoistik yang lebih berfokus pada mempertahankan kekuasaan daripada mendorong perubahan signifikan. Skandal ini menjadi cerminan dari respons egoistik tersebut, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya perubahan struktural yang dibutuhkan. Alih-alih berusaha membentuk identitas kolektif baru melalui redefinisi batas antara “*Self*” dan “*Others*”, Park justru terperangkap dalam dinamika politik yang memperkuat identitas lama yang korup dan eksklusif, bertentangan dengan gagasan Wendt bahwa perubahan identitas dan struktur harus berjalan seiring (Wendt 1999, 340).

Selain itu, budaya patriarki yang telah ada di lingkup masyarakat Korea Selatan sejak lama, tidak mendapatkan perubahan karena identitas kolektif yang dibangun oleh Park tidak berusaha untuk dapat menghilangkan budaya tersebut. Dapat dilihat bahwa salah satu aspek yang menonjol dari kegagalan Park dalam membangun identitas kolektif terlihat jelas dalam usahanya untuk mencapai

kesetaraan gender. Meskipun Park menjadi presiden perempuan pertama, kondisi perempuan di Korea Selatan sebelum dan sesudah kepemimpinannya tidak mengalami perubahan yang berarti. Data dan statistik menunjukkan bahwa masalah seperti kesenjangan upah gender, diskriminasi di tempat kerja, serta minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih tetap menjadi tantangan besar.

Menurut pandangan Wendt, kegagalan dalam mencapai kesetaraan gender ini mencerminkan bahwa perubahan struktural yang esensial belum terealisasi karena identitas kolektif yang didominasi oleh patriarki tetap tidak berubah. Upaya untuk menciptakan rasa kebersamaan ("*we-feeling*") yang lebih inklusif mengalami kegagalan, disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kebijakan gender serta situasi politik yang dipenuhi oleh skandal dan respon yang bersifat egoistik. Daripada memanfaatkan posisinya untuk memicu perubahan struktural yang signifikan, Park Geun-Hye malah terjebak dalam usaha mempertahankan status quo yang ada. Akibat dari kondisi ini adalah meskipun ada harapan bahwa kepemimpinan Park Geun-Hye akan membawa perubahan positif menuju kesetaraan gender, kenyataannya struktur patriarki yang ada tetap bertahan dan identitas kolektif yang baru, yang diharapkan dapat menggantikan identitas patriarkal tersebut, tidak terwujud. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mencapai perubahan struktural yang diperlukan guna mencapai kesetaraan gender di Korea Selatan belum berhasil, sehingga identitas kolektif yang didasarkan pada nilai-nilai patriarki terus berlanjut tanpa mengalami transformasi yang signifikan.

Selanjutnya, pandangan Wendt tentang perubahan struktural menekankan bahwa untuk mencapai transformasi yang mendalam, diperlukan perubahan identitas yang signifikan pada tingkat mikro. Sehingga perubahan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk perubahan yang lebih besar pada tingkat makro. Dalam konteks pemerintahan Park Geun-Hye, ketidakmampuannya untuk menginisiasi perubahan identitas di tingkat mikro, seperti melalui kebijakan yang mendukung perempuan, serta respons egoistik terhadap skandal-skandal yang muncul, menyebabkan kegagalan dalam mencapai perubahan struktural yang diharapkan. Meskipun Park Geun-Hye memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan membentuk identitas kolektif yang baru di Korea Selatan, kenyataannya ia tidak berhasil mencapainya.

Park Geun-Hye seharusnya bisa menjadi pemimpin yang progresif yang mendorong kesetaraan gender dan memperjuangkan perubahan yang mendalam. Namun, dia malah terjebak dalam dinamika politik yang memperkuat identitas lama yang eksklusif dan patriarki. Skandal yang muncul selama masa jabatannya semakin memperburuk situasi, menunjukkan bagaimana egoisme dan korupsi dapat menghambat proses perubahan struktural yang diperlukan untuk membangun identitas kolektif yang lebih inklusif.

Analisis terhadap kegagalan Park Geun-Hye dalam membentuk identitas kolektif yang inklusif mengungkap bahwa masalah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kebijakan berbasis gender, tetapi juga oleh serangkaian skandal yang mencerminkan respons egoistik terhadap tantangan perubahan. Dalam kerangka teori perubahan struktural menurut Wendt, kegagalan ini menegaskan bahwa tanpa adanya perubahan identitas yang mendalam serta pengelolaan

hambatan egoistik, perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender tidak akan terwujud. Akibatnya, identitas kolektif yang lama, yang berakar pada nilai-nilai patriarki, terus bertahan, dan upaya untuk menciptakan rasa kebersamaan baru yang lebih inklusif tidak berhasil.

Lebih jauh lagi, hal ini menyoroti bahwa seorang pemimpin yang benar-benar progresif tidak hanya memerlukan visi yang jelas dan kuat untuk perubahan, tetapi juga integritas dan keberanian dalam menghadapi tantangan struktural yang ada. Dalam kasus Park Geun-Hye, meskipun ada ekspektasi tinggi untuk perubahan, kegagalannya dalam menangani skandal dan memprioritaskan kebijakan yang inklusif justru memperkuat status quo dan menghambat tercapainya perubahan struktural yang diharapkan. Dengan demikian, kegagalannya mencerminkan bagaimana egoisme dan korupsi dapat menjadi penghalang besar terhadap upaya perubahan yang diperlukan untuk membentuk identitas kolektif yang lebih inklusif dan adil.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Riset ini telah berupaya untuk menjawab mengenai kepemimpinan Park Geun-Hye sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan yang tidak memberikan perubahan signifikan terhadap isu kesenjangan gender yang ada. Selama pada masa kepemimpinan Park Geun-Hye, nyatanya isu kesetaraan ini tidak mengalami adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Posisinya sebagai presiden perempuan dinilai tidak memberikan dampak yang sesuai dengan harapan akan kondisi isu gender. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dalam masa kepemimpinan Park yang kemudian tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik terkait isu kesenjangan gender. Padahal sistem pemerintahan terutama yang dipimpin oleh seorang perempuan seharusnya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama untuk sesama perempuan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan teori yang diusulkan oleh Alexander Wendt dalam bukunya *Social Theory of International Politics* (1999). Wendt memperkenalkan dua konsep kunci dalam konstruktivisme yang saling berkaitan, yaitu Identitas Kolektif dan Perubahan Struktural. Identitas Kolektif terbentuk melalui proses interaksi sosial dan penyesuaian makna antara aktor-aktor yang terlibat. Konsep ini mencerminkan cara sebuah kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri dibandingkan dengan kelompok lain, berdasarkan norma dan nilai yang mereka pegang bersama. Dalam konteks hubungan internasional, identitas kolektif mempengaruhi bagaimana

sebuah negara melihat dirinya sendiri dan berinteraksi dengan negara lain. Identitas ini dapat membentuk norma dan kepentingan yang diakui secara bersama oleh kelompok, sehingga mempengaruhi kebijakan dan tindakan mereka di kancah internasional. Menurut Wendt, perubahan dalam identitas kolektif dimungkinkan, tetapi memerlukan interaksi sosial yang terus-menerus dan pengakuan dari seluruh aktor yang terlibat.

Perubahan Struktural, menurut Wendt, adalah perubahan signifikan dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi yang memengaruhi hubungan dan perilaku antar aktor. Struktur sosial internasional dapat berubah karena proses konstruksi sosial yang dinamis, yang dipengaruhi oleh identitas kolektif yang terus berkembang. Ketika identitas kolektif ini mengalami perubahan, struktur sosial juga dapat mengalami pergeseran, yang pada gilirannya mengubah pola interaksi dan distribusi kekuasaan di antara aktor. Perubahan ini sering terjadi ketika ada pergeseran dalam cara kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri dan kelompok lain, serta bagaimana norma-norma sosial baru diadopsi atau ditolak.

Alexander Wendt dalam pandangan konstruktivismenya menjelaskan bahwa identitas kolektif terbentuk melalui interaksi sosial dan konstruksi sosial yang terus berlangsung. Identitas ini mendefinisikan bagaimana suatu kelompok memandang diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan kelompok lain, berdasarkan norma dan nilai bersama yang telah dibangun. Identitas kolektif ini berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan dan perilaku kelompok, mendorong anggota kelompok untuk bekerja sama dan melindungi kepentingan bersama mereka. Park Geun-Hye berupaya membangun identitas kolektif melalui

slogan "*let's live well*" dan posisinya sebagai "*well-prepared first female president*," untuk menginspirasi kesejahteraan nasional dan kesetaraan gender.

Namun, Wendt mengingatkan bahwa identitas kolektif memiliki keterbatasan yang dipengaruhi oleh hubungan spesifik, isu atau ancaman tertentu, dan identitas egoistik. Dalam kasus Park Geun-Hye, identitasnya sebagai presiden perempuan tidak secara aktif memajukan agenda kesetaraan gender di Korea Selatan, karena fokusnya lebih pada tujuan politik nasional yang lebih luas. Identitas gendernya digunakan lebih sebagai alat politik selama kampanye daripada sebagai landasan untuk mendorong perubahan sosial yang signifikan.

Tabel 1. *Keterbatasan dalam Identitas Kolektif Kepemimpinan Park Geun-Hye*

Batasan Identitas Kolektif	Menurut Alexander Wendt (1999)	Implementasi dalam Kepemimpinan Park Geun-Hye
<i>Relationship-specific</i>	merujuk pada identitas kolektif yang hanya berlaku dalam hubungan tertentu dan tidak dapat diterapkan pada hubungan lain	meskipun Park Geun-Hye adalah presiden perempuan, identitasnya lebih fokus pada tujuan nasional seperti ekonomi dan politik, daripada memperjuangkan kesetaraan gender, karena latar belakang politiknya yang istimewa mengurangi keterhubungannya dengan perjuangan hak perempuan di Korea Selatan
<i>Issue or threat-specific</i>	mengacu pada identitas kolektif yang dipengaruhi oleh isu atau ancaman tertentu,	Park Geun-Hye lebih fokus pada kebijakan ekonomi dan sosial serta

	dengan budaya Lockean fokus pada ancaman eksistensial dan budaya Kantian mencakup kerja sama terhadap berbagai ancaman militer	hubungan dengan Korea Utara, tanpa memprioritaskan isu kesetaraan gender, sesuai dengan budaya Lockean yang menganggap masalah gender bukan sebagai ancaman utama bagi stabilitas nasional
<i>Egoistic identities</i>	mengacu pada konflik antara identitas kolektif dan kepentingan pribadi, di mana individu sering kali memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri meski mereka terikat pada kelompok	Park Geun-Hye memanfaatkan identitasnya sebagai perempuan untuk meraih suara pemilih perempuan selama kampanye, tetapi saat menjabat, ia tidak mengutamakan kesetaraan gender, menjadikannya sebagai alat politik praktis ketimbang upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan

Sumber: *Social Theory of International Politics (1999)*

Alexander Wendt menjelaskan bahwa perubahan dalam budaya yang telah diinternalisasi dapat mengubah identitas kolektif suatu kelompok. Ketika struktur budaya berubah, identitas kelompok juga dapat mengalami perubahan, sering kali dengan menghilangkan identitas lama dan menggantinya dengan yang baru. Namun, perubahan struktur dan identitas adalah dua hal yang berbeda: identitas terbentuk di tingkat mikro (individu atau kelompok kecil), sementara perubahan struktur terjadi di tingkat makro (masyarakat atau negara). Perubahan struktural

membutuhkan usaha besar karena struktur cenderung stabil dan dipengaruhi oleh sejarah (*path dependency*).

Park Geun-Hye, sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan, gagal membangun identitas kolektif yang kuat karena tidak berhasil memprioritaskan kebijakan kesetaraan gender. Kegagalan ini diperparah oleh budaya patriarki yang kuat dan skandal korupsi yang mengguncang pemerintahannya. Menurut Wendt, perubahan struktural memerlukan perubahan identitas yang mendasar di tingkat mikro, yang tidak terjadi dalam kepemimpinan Park. Dibandingkan memicu perubahan sosial, Park justru malah terjebak dalam dinamika politik yang memperkuat identitas lama yang eksklusif dan patriarki.

4.2. Rekomendasi

Terkait penulisan penelitian ini, penulis menyadari bahwa akan adanya beberapa kekurangan, baik dalam hal data maupun pembahasan yang disampaikan. Terlebih mengenai isu skandal Park Geun-Hye yang masih belum dapat dibahas secara terperinci. Keterbatasan bahasa dan akses terhadap sumber terkait juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penelitian ini. Namun, mengingat topik ini sangat menarik, penulis merekomendasikan studi komparatif antara Korea Selatan dan negara-negara lainnya, terutama Asia yang pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Studi ini akan menjadi relevan dan menarik jika dapat membandingkan bagaimana pemimpin perempuan dengan latar belakang berbeda mempengaruhi isu kesetaraan gender di masing-masing negara. Teori ini tidak hanya akan memperkaya analisis, tetapi juga memberikan wawasan lebih luas

mengenai dampak kepemimpinan perempuan dalam konteks budaya dan struktur sosial yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- “1979: South Korean President Killed.” 1994. BBC News. October 26, 1994.
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/26/newsid_2478000/2478353.stm.
- Bedeski, Robert. 2002. *The Transformation of South Korea: Reform and Reconstitution in the Sixth Republic Under Roh Tae Woo, 1987-1992*. 0 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203426364>.
- Cha, Victor, and Ellen Kim. 2012. South Korea Elects President Park Geun-hye. <https://www.csis.org/analysis/south-korea-elects-president-park-geun-hye>.
- Choi, Yerin. 2016. [Interview] Park Geun-hye believed in Choi Tae-min after he predicted her father's deathHankyoreh. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/768958.html.
- Gajdos, Lukas, and Roberto Bendini. 2012. “The 2012 South Korean Presidential Election.”
- Gemici, Kurtuluş. 2013. “South Korea during the Park Chung Hee Era: Explaining Korea's Developmental Decades.” *Asian Journal of Social Science* 41 (2): 175–92. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341297>.
- Gould, Elise, Jessica Schieder, and Kathleen Geier. 2016. “What Is the Gender Pay Gap and Is It Real?” Washington, DC: Economic Policy Institute. epi.org/112962.
- Han, Hee Sook. 2004. “Women's Life During the Choson Dynasty” 6 (International Journal of Korean History): 50.
- Han, Ju Hui Judy, and Jennifer Jihye Chun. 2014. “Introduction: Gender and Politics in Contemporary Korea.” *Journal of Korean Studies* 19 (2): 245–55. <https://doi.org/10.1353/jks.2014.0024>.
- Harlan, Chico. 2013. “South Korea's New Leader, Park Geun-Hye, Was Pushed onto Political Stage by Tragedy - The Washington.” *The Washington Post*, January 25, 2013. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/for-s-koreas-park-after-tragedy-a-first-taste-of-power/2013/01/25/0dc9382e-5e30-11e2-90a0-73c8343c6d61_story.html.

- Hwang, Kyung Moon. 2015. "Life and Role of Gisaeng Courtesans," February 4, 2015.
- Jager, Sheila Miyoshi. 2013. *Brothers at War: The Unending Conflict in Korea*. United Kingdom: PROFILE BOOKS LTD.
- Jong Seok, Hong. 2006. "대전 '박근혜 생각하면 결심이 흔들려요.'" *Maekyung*. May 25, 2006. <https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0000506402?sid=100>.
- Kim, Eui Gyeom. 2016. "'최순실이 박대통령에 이래라저래라 시키는 구조.'" *Hankyoreh*. October 25, 2016. https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/767209.html.
- Kim, Heisook. 2017. "Confucianism and Feminism in Korean Context." *Diogenes*, 7.
- Kim, Ji-Hye, Sarah Soyeon Oh, Suk Won Bae, Eun-Cheol Park, and Sung-In Jang. 2019. "Gender Discrimination in the Workplace: Effects on Pregnancy Planning and Childbirth among South Korean Women." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16 (15): 2672. <https://doi.org/10.3390/ijerph16152672>.
- Kim, Jinyoung, Jong-Wha Lee, and Kwanho Shin. 2016. "Impact of Gender Inequality on the Republic of Korea's Long-Term Economic Growth: An Application of the Theoretical Model of Gender Inequality and Economic Growth." *SSRN Electronic Journal*, 28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2737837>.
- KOCIS. 2014. "Six Keywords of Park Geun-Hye Administration's Major Policies." *Government of the Republic of Korea*. <https://www.kocis.go.kr/ebook/ecatalog5.jsp?Dir=333&eclang=en>.
- Korea Herald. 2013. "Park's Swearing-in Draws Record 70,000 Participants." *The Korea Herald*. February 24, 2013. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130224000257>.
- Lee, Byong Won. 1979. "Evolution of the Role and Status of Korean Professional Female Entertainers (Kisaeng)," *The World of Music*, 21 (No. 2): 75–84.

- Lee, Insuk. 2010. "Convention and Innovation: The Lives and Cultural Legacy of the Kisaeng in Colonial Korea (1910-1945)." *Kyujanggak Institute for Korean Studies*, Seoul Journal of Korean Studies, 23 (1): 71–93.
- Lee, Young Im. 2017. "From First Daughter to First Lady to First Woman President: Park Geun-Hye's Path to the South Korean Presidency." *Feminist Media Studies* 17 (3): 377–91. <https://doi.org/10.1080/14680777.2016.1213307>.
- Lee, Young Im, and Farida Jalalzai. 2017. "President Park Geun-Hye of South Korea: A Woman President without Women?" *Politics & Gender* 13 (04): 597–617. <https://doi.org/10.1017/S1743923X17000204>.
- Min, Pyong Gap. 2003. "Korean 'Comfort Women': The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class." *Gender & Society* 17 (6): 938–57. <https://doi.org/10.1177/0891243203257584>.
- Monk–Turner, Elizabeth, and Charlie G Turner. 2000. "The Relative Pay of Men and Women in South Korea." *Journal of Asian Economics* 11 (2): 223–36. [https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(00\)00052-X](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(00)00052-X).
- "Moon Jae-in: South Korea's President with Humble Roots." 2018. BBC News. April 26, 2018. <https://www.bbc.com/news/world-asia-39860158>.
- Munro, André. 2022. "Park Geun-Hye." In *Encyclopedia Britannica*. World Leaders. Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Park-Geun-Hye>.
- News 1 Korea. 2013. "부흥, 융성, 소명...' 박 대통령 취임사 60 년대 데자뷰." News1 Korea. February 25, 2013. <https://www.news1.kr/politics/president/1024223>.
- OECD. 2021. "Women in Politics." OECD Data. 2021. <https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm>.
- . 2022. "Gender Wage Gap." OECD Data. 2022. <https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm>.
- . 2023. *OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1: Preliminary Version*. OECD Economic Outlook. OECD. <https://doi.org/10.1787/ce188438-en>.

- Park, Yoonhee. 2016. "A Microdata Analysis of the Gender Pay Gap in South Korea: How Do Social Norms and Gender Role Attitudes Affect the Labor Force Participation of Korean Women?" Paper 329. Senior Projects Spring 2016. Bard College. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/329/.
- Reuters. 2017. "Timeline: Impeachment of South Korea's President Park Geun-Hye." VOA News. March 9, 2017. <https://www.voanews.com/a/timeline-impeachment-south-korea-park-geun-hye/3758360.html>.
- Shin, Ki-young. 2018. "Gender, Election Campaigns, and the First Female President of South Korea." *Ochanomizu University*, no. Gender and Political Leadership (May), 71–86.
- Sohn, Young Il. 2012. "박근혜, 여성정책 공약 7 가지 제시, 민주 대선주자 7 인 여성정치캠프 집합... '女心' 이심전심." *Dong-A Ilbo*. July 20, 2012. <https://www.donga.com/news/rel/article/all/20120720/47906284/1>.
- Soo Hyun, Mun. 2015. "'Femininity without Feminism': Korea's First Woman President and Her Political Leadership." *Asian Journal of Social Science* 43 (3): 249–72. <https://doi.org/10.1163/15685314-04303003>.
- "South Korea Population 2023 (Live)." 2023. World Population Review. 2023. <https://worldpopulationreview.com/countries/south-korea-population>.
- Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. United Kingdom: Basil Blackwell.
- Ward, Thomas J, and William D Lay. 2018. "The Origins and Implementation of the Comfort Women System." *International Relations*, December.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- World Economic Forum, ed. 2021. *Global Gender Gap Report 2021: Insight Report*.
- Yeon Cheol, Seong. 2012. "'5·16-유신-인혁당, 헌법가치 훼손' 박근혜, 2 주 만에 달라진 역사관." *Hankyoreh*. September 24, 2012. <https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/553199.html>.